

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dijelaskan dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada Kecamatan Kabupaten Karanganyar, dijelaskan bahwa guna mendukung segala potensi kewilayahan dan kecamatan secara umum pada prakteknya peran strategis yang dikedepankan terkait dengan keberadaan kecamatan sebagai instansi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Atas dasar penjelasan tersebut OPD Kecamatan sebagai salah satu unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani proses awal pada sektor penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat, pembangunan disegala bidang serta pembinaan kemasyarakatan secara luas berkewajiban memberikan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggung jawaban Kepala OPD dalam hal ini Camat Mojogedang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kecamatan Mojogedang Tahun 2020 yang merupakan Laporan Pencapaian Program Dan Kegiatan Kecamatan Mojogedang Tahun 2020 adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana rencana kegiatan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan/ kerja tahun anggaran 2020.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan laporan pelaksanaan tugas ini adalah

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16)
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 13)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 18)
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 12)
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 69)
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Penyusunan Laporan Pelaksana Tugas ini dimaksud :

- a) Sebagai Laporan Pertanggung Jawaban Kepada Bupati atas Kinerja OPD Kantor Kecamatan Mojogedang selama 1 (satu) tahun anggaran 2020.
- b) Sebagai input Pemerintah Daerah dalam mengukur Capaian Kinerja dan yang telah dicapai dari berbagai Program dan Kegiatan.
- c) Sebagai tanggung jawab OPD Kantor Kecamatan Mojogedang atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah diberikan.

2. Pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Tugas bertujuan :
 - a) Mengendalikan OPD secara Efektif dan Efisien sampai pada implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran.
 - b) Sebagai bahan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - c) Sebagai bahan bagi Bupati untuk mengevaluasi kinerja OPD Kantor Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

BAB II

DESKRIPSI

A. Tugas dan Fungsi

Kecamatan Mojogedang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang dibawahi dan bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.

Sebagai dasar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat secara lebih terinci diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi

Selanjutnya mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 4 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dan Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan.
- c. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa atau sebutan lain dan / atau Kelurahan.
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan dan
- e.. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Tugas dan Fungsi.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat dan ayat (2) menyebutkan bahwa kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan Kelurahan/ Desa, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan sbb. :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Seksi Pelayanan Umum dan
- h. Kelompok Desa/Kelurahan

B. Jumlah Program Nasional

Nihil

C. Standard Operating Procedure (SOP)

Adapun berdasarkan Keputusan Camat Mojogedang Nomor : 900/06 Tahun 2020.

Tentang Standart Operasional Prosedur Bidang Administrasi Pemerintahan Pada OPD Kecamatan Mojogedang Sebagai berikut :

1. SOP Administrasi Surat Masuk
2. SOP Administrasi Surat Keluar.
3. SOP Pengajuan SPM-GU/TU
4. SOP Pembuatan RKA
5. SOP Pengajuan SPP dan SPM
6. SOP Pembuatan DPA
7. SOP Pembuatan KK (Kartu Keluarga)
8. SOP Pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
9. SOP Legalisasi
10. SOP Perijinan IUMK (Ijin Usaha Mikro dan Kecil)
11. SOP Perijinan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)

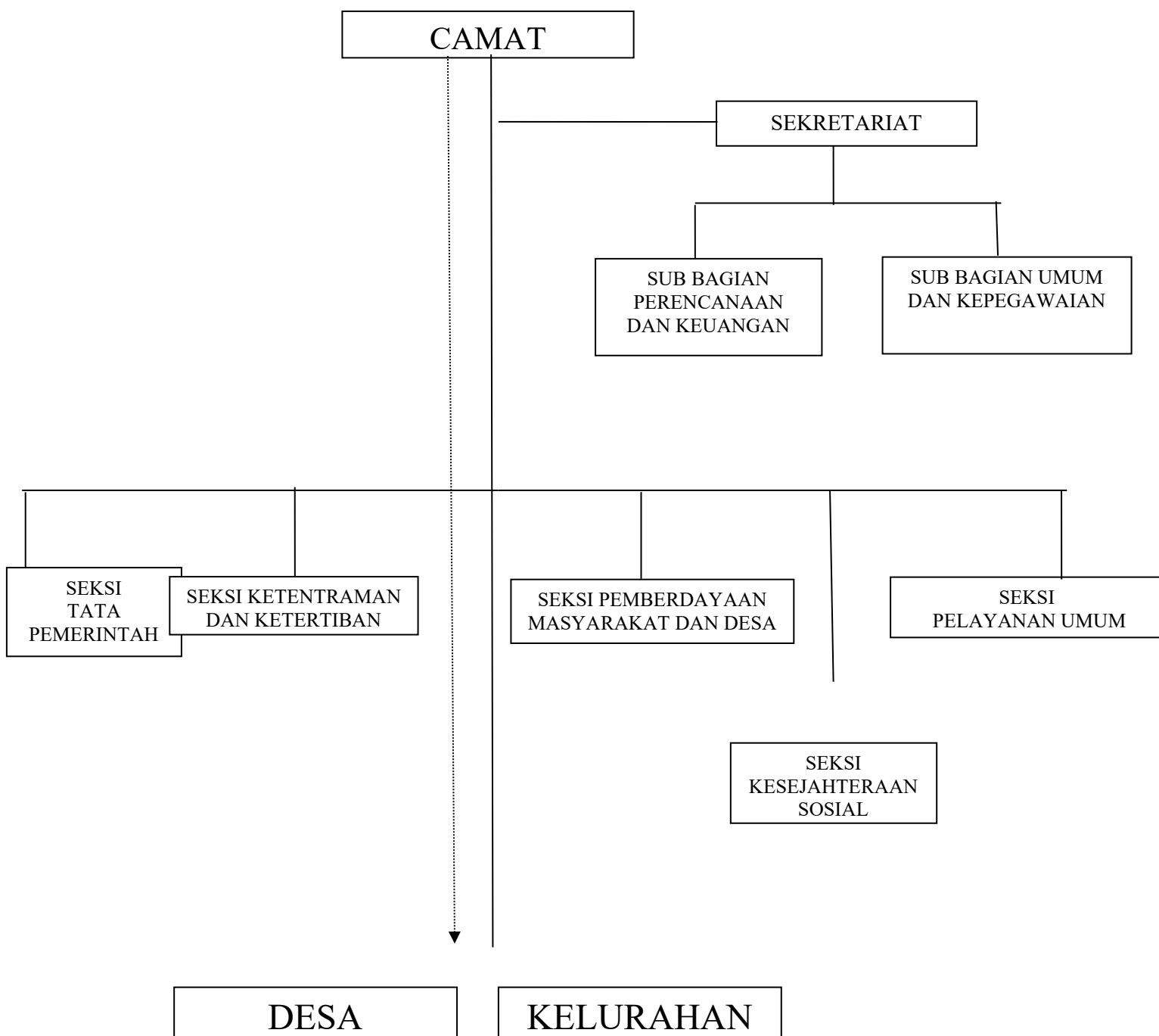
12. SOP Administrasi Legalisasi Surat Pengantar Nikah
13. SOP Administrasi Dispensasi Nikah
14. SOP Musrenbang
15. SOP Pembinaan Linmas
16. SOP Pembinaan Wilayah
17. SOP IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
18. SOP Pelaksanaan Picket Kantor Kecamatan
19. SOP Administrasi Legalisasi Surat Pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan Ijin Keramaian.

D.Perda /Perbup yang Berkaitan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21):
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020: (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 3):
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Annagran 2020 (Berita DAerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Buapti Karanganyar Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Enam Atas Peraturan Buapti Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 62):
4. Peraturan Buapti Karanagnyar Nomor 30 TAHun 2020 Tentang Pedoman Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Perubahan Alokasi, dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 30).

E. Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN BERBUP NO. 117 TAHUN 2016



F.Kepegawaian berdasarkan urusan yang dilaksanakan**1. DAFTAR PEGAWAI**

No	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN (PNS/CPNS)	PANGKAT GOLONGAN
1	Eko Joko Iswanto,SH	19630831 199103 1 007	PNS	Pembina (IV / a)
2	Ir. Santosa,MM	19630225 198903 1 008	PNS	Pembina (IV / a)
3	Drs. Toto Joko M , MM	19670423 199403 1 009	PNS	Pembina (IV/a)
4	Drs. Iskam,MM	19630120 199203 1 007	PNS	Pembina (IV / a)
5	Dadiyo, SE	19631015 198503 1 009	PNS	Penata Tk I (III / d)
6	Drs. Joko Purwanto	19650106 200604 1 007	PNS	Penata (III / c)
7	Dwi Martanti,SE	19700302 199003 2 008	PNS	Penata Tk I (III / d)
8	Sukarsih,S Sos.	19640711 199303 2 006	PNS	Penata Tk.I (III / d)
9	Tuminem,SE	19651001 198607 2 001	PNS	Penata Tk.I (III / d)
10	Erwin Prilastiani,SH	19730326 199703 2 010	PNS	Penata (III / c)
11	Sri Wuryanto	19631013 199303 1 002	PNS	Penata Muda Tk.I (III / b)
12	Anna Harviyani,SE	19780811 201101 2 003	PNS	Penata (III / c)
13	Emy Yuslihah,SE	19810905 201001 2 017	PNS	Penata (III / c)
14	Suyatmi	19670701 199311 2 001	PNS	Penata Muda Tk I (III / b)
15	Ita Dianawati, SE	19710910 199803 2 009	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)

2) DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL YANG TERISI

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1	Eko Joko Iswanto,SH	CAMAT		
2	Ir. Santosa,MM	SEKRETARIS KECAMATAN		
3	Drs. Toto Joko Mulyono, MM	KASI TRANTIB		
4.	Drs. Iskam, MM	KASI YANUM		
5.	Dadiyo, SE	KASI PEMAN		
6	Drs. Joko Purwanto	KASI KESOS		
7	Dwi Martanti,SE	KASI PMD		
8	Sukarsih, S.Sos	KASUBAG PERENC. DAN KEUANGAN		
9	Tuminem, SE	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		

3) DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL YANG BELUM TERISI

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	N I H I L	

4.) DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL (UMUM / KHUSUS)

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
	NIHIL		

5.) DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL YANG BELUM TERISI (Umum / Khusus)

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
	NIHIL	

BAB III
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

1) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar.

a) Pendidikan

No.	IKK PUT	OUT	IKK COME	OUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	Sumber Data (OPD)
1	2		3		4	5	6
N I H I L							

2). Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar

a) Tenaga Kerja

No.	IKK PUT	OUT	IKK COME	OUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	Sumber Data (SKPD)
N I H I L							

3). Urusan Pemerintahan Pilihan

a). Pariwisata

No.	IKK PUT	OUT	IKK COME	OUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	Sumber Data (SKPD)
N I H I L							

4). Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a). Perencanaan

No.	IKK PUT	OUT	IKK COME	OUT	RUMUS	CAPAIN KINERJA	Sumber Data (SKPD)

5) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

N I H I L

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YNG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

4.a. Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan Strategis	Program	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan	N I H I L								

4.b. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan Strategis	Program	Urusan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tenga Kerja	N I H I L								

4.c. Pelaksanaan Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan Strategis	Program	Urusan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kelautan dan Perikanan	N I H I L								

4.d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan Strategis	Program	Urusan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi	Kantor Kecamatan Mojogedang	1.Perda Kab.Kra No.21 Tahun 2019	1. Program Pelayanan Adm.Perkantoran	1.Penyediaan Jasa Surat menyurat. Anggaran : Rp.33.000.000,- Realisasi : Rp.`33.000.000,-	1.2 orang THL/1 2 bln.	1. 2 orang THL (100%).			

	Pemerintahan		<p>2.Perda Kab Kra No. 3 Th 2020</p> <p>3,Perbup Kra No. 101 Th 2019</p> <p>4.Perbup No.30 Th 2020</p>		<p>Persentase (100 %)</p> <p>2.Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik. Anggaran : Rp. 22.040.000,- Realisasi : Rp. 18.446.652 ,- Persentase: (83,70 %)</p> <p>3. Penyediaan Jasa kantor. Anggara : Rp. 93.663.000,- Realisasi: Rp. 89.763.000 ,- Persentase: (95,80 %)</p>	<p>2. 3 Item / 12 Bln</p> <p>3. 8 THL / 17 Item/12 Bln</p>	<p>2.3 Item/ 12 Bln (100%)</p> <p>3.8 THL/17 Item/12 bln (100 %).</p>			
--	--------------	--	--	--	---	--	---	--	--	--

					<p>4. Peyediaan Alat Tulis kantor. Anggaran : Rp.14.834.600,- Realisasi: Rp 14.834.200,- Persentase: (100 %)</p>	4.42 Item/12 Bln	4.42 Item/12 Bln (100%)			
					<p>5.Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Anggaran: Rp. 8.439.000,- Realisasi : Rp. 8.439.000 ,- Persentase: (100 %)</p>	5.2 Item / 12 bln	5.2 Item / 12 bln (100 %).			

					6.Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor. Anggaran : Rp. 8.714.000,- Realisasi : Rp.8.714.000,- Persentase (100 %)	6, 15 Item / 12 Bln	6, 15 Item / 12 Bln (100 %)			
					7.Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan Anggaran : Rp. 3.000.000,- Realisasi : Rp. 3.000.000 ,- Presentase (100 %)	7. 1 Tahun	7. 1 Tahun (100 %)			

					8.Penyediaan Makanan dan Minuman Anggaran : Rp. 19.150.000,- Realisasi Rp. 19.050.000 ,- Presentase (99,50 %)	8. 29 Orang / 12 Bln	8. 29 Orang / 12 Bln (100 %)			
					9. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Anggaran : Rp. 25.500.000,- Realisasi Rp. 25.445.000 ,- Persentase (99,80 %)	9. 115 Kegiatan	9. 115 Kegiatan (100 %)			

					10, Penyediaan Bahan Logistik Rumah Dinas Anggaran Rp. 8.715.800,- Realisasi: Rp. 8.479.00,- Persentase (97,30 %)	10. 3 Item / 12 Bln	10. 3 Item /12 Bln (100 %)			
				2. Proram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11. Pembangunan Gedung Kantor. Anggaran: Rp. 948.387.000,- Realisasi : Rp 947.186.848,- Persentase: (99,90 %)	11.1 gedung	11.1 gedung (100%).			

					12.Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas. Anggaran : Rp. 9.000.000,- Realisasi : Rp. 9.000.000,- Persentase: (100 %)	12.1 kegiatan	12.1 kegiatan (100%).			
					13.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Anggaran : Rp.32.886.600,- Realisasi : Rp 29.823.700 ,- Pesentase: (90,70 %).	13.5 unit/12 bln	13. 5 Unit/12 bln (100 %)			

					14.Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor. Anggaran : Rp.2.500.000,- Realisasi : RP. 1.695.000 ,- Persentase : (67,80 %).	14.10 uniiit/12 bln	14. 10 unit/12 bln (100 %).			
					15. Penataan halam Kantor. Anggaran : Rp. 150.000.000,- Realisasi : Rp 146.600.000 ,- Persentase: (97,70 %)	15. 1 kegiatan	15. 1 kegiatan (100%).			

					16.Fasilitas Pemindahan Gedung Kantor. Anggaran' Rp.1.000.000,- Realisasi : RP. 1.000.000,- Persentase: (100%).	16. 1 kegiatan	16. 1 kegiatan (100%)			
				3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan.	-	-			
				4.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.Penyusunan DPA dan DPPA OPD. Anggaran : Rp. 3.000.000,- Realisasi :	17. 2 Dokumen	17. 2 Dokumen (100%).			

					<p>Rp. 2.970.000 ,- Persentase : (99,00 %).</p>					
					<p>18.Penyusunan LPT OPD. Anggaran : Rp. 2.500.000,- Realisasi : Rp. 2.500.000,- Persentase: (100%)</p>	18.1 dokumen	18. 1 Dokumen (100%)			
					<p>19.Penyusunan LKjIP OPD. Anggaran : Rp. 2.500.000,- Realisasi: Rp. 2.500.000,- Persentase: (100%)</p>	19. 1 Dokumen	19. 1 Dokumen (100%).			

					20.Penyusunan CALK OPD Anggaran : Rp. 2.500.000,- Realisasi: Rp. 2.500.000,- Persentase: (100%).	20. 1 Dokumen	20. 1 Dokumen (100%)			
				5.Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	21.Fasailitasi dan koordinasi Keamanan dan ketertiban. Anggaran: Rp.32.920.000,- Realisasi: Rp. 32.900.000 ,- Persentase; (99,90 %)	21.12 bln/13 Ds.	21. 12 bln/12 Ds. (100%).			

					<p>22. Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan Sosial. Anggaran: Rp. 15.475.000,- Realisasi : Rp. 14.835.000 ,- Persentase : (95,90 %)</p>	<p>22. 5 kegiatan/1 Tahun.</p>	<p>22. 5 kegiatan / 1 Tahun. (100%).</p>			
					<p>23.Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Anggaran : Rp. 25.430.000.- Realisasi: Rp. 25.410.000 ,- Persentase: (99,90 %).</p>	<p>23. 13 ds/12 bln</p>	<p>23.13Ds/12 bln (100%).</p>			

					<p>24. Fasilitas dan Koordinasi Tata Pemerintahan. Anggaran : Rp. 5.802.000,- Realisasi : Rp. 5.762.000,- Presentase: (99,30 %)</p>	<p>24. 13 Desa/12 bln.</p>	<p>24. 13 Ds/12 Bln. (100%).</p>			
					<p>25. Fasilitas dan koordinasi Pelayanan Masyarakat. Anggaran: Rp. 1.490.000,- Realisasi: Rp. 1.490.000,- Persentase: (100%).</p>	<p>25. 13 Desa.</p>	<p>25. 13 Desa (100%).</p>			

BAB V
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

1. Tugas yang diterima dari Pemerintah (Pemerintah Pusat) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten.

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Perangkat Daerah

No.	Kementrian/LPNK	Dasar Hukum	Uraian Progran dan Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								

2. Tugas Yang diterima dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Perangkat Daerah

No.	Kementrian/LPNK	Dasar Hukum	Uraian Progran dan Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								

3. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Desa

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Desa

No.	Kementrian/LPNK	Dasar Hukum	Uraia Progran dan Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL

A. Urusan Pendidikan

N I h I I

B. Bidang Urusan Kesehatan

N I h I I

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

N I h I I

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

N I h I I

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

N I h I I

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama Tahun Anggaran 2020 secara umum program yang telah direncanakan di Kecamatan Mojogedang telah dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja terhadap sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan utama pendukung pencapaian sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup berhasil. Dengan keberhasilan ini berarti sebagian besar sasaran telah dapat tercapai.

Dari segi anggaran meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19 dan ada beberapa kegiatan yang menyerapannya tidak 100% , namun pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien dan secara keseluruhan program / kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mojogedang pada tahun anggaran 2020 dapat tercapai hasil sesuai yang direncanakan / target Pelaksanaan operasional kegiatan Kecamatan Mojogedang hanya mendapat alokasi dana APBD Kabupaten Karanganyar. Alokasi dana tersebut telah dipertanggungjawabkan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan.

Secara umum dalam tahun anggaran 2020 Kecamatan Mojogedang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan kualitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mojogedang, kami mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan
2. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, kursus keahlian, seminar, dan sebagainya.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.

Mojogedang, 31 Desember 2020

CAMAT MOJOGEDANG

EKO JOKO ISWANTO,SH

Pembina

NIP. 19630831 199103 1 007

